

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI PULAU JAWA**

TAHUN 2010-2016

JURNAL PUBLIKASI



Oleh:

Nama : Ellza Alfya Rahma

Nim : 14313251

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

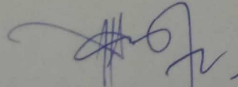
PENGESAHAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI PULAU JAWA
TAHUN 2010-2016

Nama : Ellza Alfya Rahma
Nomor Mahasiswa : 14313251
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 9 Januari 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen pembimbing,



Heri Sudarsono, S.E., M.Ec

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2010 sampai dengan 2016. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini diantaranya yaitu PDRB Perkapita, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dengan menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan *software Eviews 8*. Data panel yaitu gabungan antara data time series berupa urutan waktu yang digunakan yaitu tahun 2010-2016 dan data *cross section* yaitu berupa urutan lintang yaitu berupa 6 Provinsi di Pulau Jawa dengan total jumlah observasi yaitu 42. Adapun model yang paling tepat dalam penggunaan data panel adalah *fixed effect Model*. Adapun hasil yang diperoleh bahwa variabel PDRB perkapita, PDRB Perkapita, IPM, TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016. Sedangkan variabel TPAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2016.

Kata kunci : Ketimpangan Pendapatan, PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan dalam perbedaan sumber daya alam yang tersedia serta kondisi geografis membuat setiap daerah memiliki perbedaan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Maka tidak heran apabila pada suatu daerah ada yang tergolong daerah yang maju (developed region) dan daerah yang tergolong daerah yang terbelakang (underdeveloped region). Karena adanya proses pembangunan di setiap daerah yang akan menimbulkan terjadinya ketimpangan, maka perlu dilakukan pembenahan dalam membuat suatu kebijakan sehingga tidak akan terjadi lagi ketimpangan di setiap daerah (Sjafrizal, 2012).

Dalam mengukur ketimpangan pendapatan menurut BPS yang terjadi antar masyarakat dapat dilihat menggunakan indeks gini (gini rasio). Mengukur ketimpangan dengan menggunakan indeks gini berbeda dengan indeks theil. Kisaran angka dalam indeks gini yaitu antara 0 sampai 1. Apabila angka indeks gini mendekati angka 0 menandakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat semakin rendah (merata) namun ketika mendekati 1 menandakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat semakin tinggi (melebar).

Tabel 1.1

Indeks Gini Indonesia (%)

Tahun	Gini Rasio
2012	0,41
2013	0,41
2014	0,41
2015	0,41
2016	0,40

(Sumber : BPS Sulawesi Selatan)

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa indeks gini Indonesia pada tahun 2012-2016. Pada tahun 2012-2015 angka indeks gini Indonesia tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu dengan angka indeks gini sebesar 0,41% tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,40%.

Salah satu indeks gini tertinggi di Provinsi Indonesia tahun 2016 adalah Provinsi Jakarta dan Provinsi Jawa yaitu sebesar 0,41%. Bahkan angka indeks gini Provinsi Jakarta dan Provinsi Jawa barat ini melebihi indeks gini Indonesia pada tahun 2016 (BPS 2017). Namun secara umum indeks gini Indonesia masih tergolong ketimpangan sedang.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik antar wilayah ternyata masih menyisakan beberapa masalah seperti perbedaan kandungan sumber daya alam yang tersedia di setiap wilayah, perbedaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana serta persebaran investasi yang belum merata yang menimbulkan adanya wilayah yang terbelakang. Hal tersebut terlihat dengan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan perkapita antar masyarakat dalam suatu Provinsi (Darzal, 2016).

Kenyataan yang menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki indeks pembangunan yang berbeda-beda membuat indeks pembangunan manusia juga berkaitan erat dengan adanya ketimpangan pendapatan rendahnya angka Indeks pembangunan manusia menyebabkan produktivitas yang di hasilkan oleh masyarakat juga menurun dan kemudian berdampak pada pendapatan masyarakat yang juga mengalami penurunan dan begitu juga sebaliknya (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017).

Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup tinggi. Adanya jumlah penduduk yang tinggi di suatu negara tidak selalu membuat pembangunan ekonomi berhasil namun juga bisa menjadikan permasalahan dalam suatu pembangunan. Hal ini terjadi ketika tingginya jumlah penduduk namun tidak diikuti dengan jumlah lapangan pekerjaan yang banyak (Sulistiawati, 2012) ,maka pada akhirnya membuat persaingan dalam mencari pekerjaan semakin sulit. Hal ini kemudian membuat para pekerja kelas rendah/buruh lebih memilih untuk dibayar lebih rendah dari pada harus menganggur yang kemudian membuat semakin melebarnya ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat.

Menurut (Rose & Sovita, 2016) adanya tingkat pengangguran di suatu wilayah mengindikasikan bagaimana kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Tingginya pengangguran di suatu wilayah mengindikasikan adanya faktor produksi yang masih tidak digunakan secara keseluruhan untuk menunjang pembangunan. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan PDRB Perkapita dalam suatu wilayah akan menyebabkan kesejahteraan antar masyarakat semakin rendah dan juga terhambatnya pembangunan di suatu wilayah yang kemudian akan menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

A. KAJIAN PUSTAKA

Rosa & Sovita (2016) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi data panel dengan jumlah data time series 7 tahun yaitu tahun 2009-2015 dan data cross section 6 Provinsi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDB, populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat desentralisasi fiskal terhadap ketidakmerataan pendapatan secara parsial dan simultan dengan signifikansi 5% dengan model yang tepat digunakan adalah fixed effect model. Hasil yang diperoleh bahwa pengaruh PDB, populasi penduduk, tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan yaitu positif dan signifikan. Variabel independen dalam penelitian ini mampu menggambarkan terjadinya ketimpangan pendapatan sebesar 78,59% dan sisanya yaitu 21,41% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen.

Danawati dkk (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis program AMOS. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah serta investasi terhadap kesempatan kerja (TPAK). Investasi memiliki

hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel tenaga kerja (TPAK) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi juga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan secara tidak langsung memiliki pengaruh positif melalui variabel tenaga kerja (TPAK) serta pertumbuhan ekonomi. Serta hubungan variabel pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja (TPAK) dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah positif dan signifikan.

Hartini (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh PDRB perkapita, investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi DIY tahun 2011-2015 yang Tujuannya yaitu mengetahui pengaruh variabel PDRB Perkapita, Investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi DIY pada periode tahun 2011 2015 dengan menggunakan analisis data panel dengan model yang tepat digunakan adalah fixed effect model. Hasil yang diperoleh yaitu pengaruh variabel PDRB Perkapita terhadap ketimpangan pendapatan adalah positif dan signifikan sedangkan pengaruh investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan adalah negatif dan signifikan.

Arif & Wicaksoni (2017) melakukan penelitian tentang ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur 2011-2015 dengan variabel bebas yaitu IPM, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja serta jumlah penduduk dengan menggunakan analisis data panel serta model regresi paling tepat digunakan adalah random effect. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa variabel IPM mempunyai hubungan positif dan signifikan. Selain itu hubungan variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan yaitu signifikan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder yang di dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan data panel. Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Data *time series* berupa urutan waktu yang digunakan yaitu tahun 2010-2016 dan data *cross section* yaitu berupa urutan lintang yaitu berupa 6 Provinsi di Pulau Jawa dengan total jumlah observasi yaitu 42. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah variabel dependen yaitu indeks gini dipengaruhi oleh beberapa variabel independen yaitu berupa PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Metode analisis panel data merupakan kombinasi antara deret waktu (*time series*) dengan analisis deret hitung (*cross section*).

$$IG = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{IPM} + \beta_3 \text{TPT} + \beta_4 \text{TPAK} + \mu$$

Dimana:

IG	= Jumlah Indeks Gini (Persen)
PDRB	= Jumlah PDRB Perkapita ADHK 2010 (ribu rupiah)
IPM	= Jumlah Indeks Pembangunan Manusia (persen)
TPT	= Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
TPAK	= Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)
B_0	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$	= Koefisien regresi berganda
μ	= Variabel pengganggu

Untuk menentukan model manakah yang paling tepat digunakan antara model *common effect* dan *fixed effect*, maka perlu dilakukan uji *chow*. Dimana uji *chow* dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat diantara kedua model tersebut dengan hipotesis yang digunakan dalam uji *chow* adalah:

H0 : gagal menolak model *common effect* atau pooled OLS ketika nilai probabilitas yang dihasilkan adalah tidak signifikan terhadap α sebesar 1%.

H1 : gagal menolak *fixed effect* ketika nilai probabilitas yang dihasilkan adalah signifikan terhadap α 1%.

Sehingga model yang paling tepat digunakan adalah model *common effect*. Berikut ini persamaan uji chow :

$$F = \frac{(RSS_1 - RSS_2) / m}{(RSS_2) / (n-k)}$$

Dengan RSS_1 dan RSS_2 adalah *residual sum of square* teknik tanpa variabel dummy dan teknik *fixed effect* dengan variabel dummy.

Menurut (Widarjono, 2013) dalam memilih model manakah yang paling tepat digunakan antar *fixed effect* dan *random effect*, maka uji yang perlu dilakukan yaitu dengan menggunakan uji hausman dengan hipotesis nya sebagai berikut:

H0 : Gagal menolak model *random effect*, apabila nilai chi-square yang dihasilkan dalam uji hausman tidak signifikan pada α 1%.

H1 : Gagal menolak model *fixed effect*, apabila nilai chi-squarenya yang dihasilkan dalam uji hausman signifikan pada α 1%.

Berikut ini persamaan dari uji hausman:

$$\text{Var}[\hat{\beta} - \hat{\beta}_{\text{GLS}}] = \text{Var}[\hat{\beta}] + \text{Var}[\hat{\beta}_{\text{GLS}}] - \text{Cov}[\hat{\beta}, \hat{\beta}_{\text{GLS}}] - \text{Cov}[\hat{\beta}, \hat{\beta}_{\text{GLS}}]'$$

Selain itu dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan beberapa model analisis yaitu uji koefisien determinan (uji R^2), uji koefisien secara bersama-sama (uji F-statistik) dan uji koefisien regresi secara individu (uji T). Hasil yang diperoleh dalam penggunaan analisis regresi data panel mana peneliti menggunakan metode analisis regresi *fixed effect* sebagai pengujian terakhir,

dimana metode ini paling tepat digunakan dengan adanya penggunaan uji chow dan uji hausman.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.2
Hasil Regresi Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.937868	0.303591	-3.089245	0.0041
PDRB?	1.68E-06	6.02E-07	2.796527	0.0087
IPM?	0.012682	0.002902	4.370389	0.0001
TPT?	0.012305	0.002671	4.606938	0.0001
TPAK?	0.003987	0.002108	1.890991	0.0677
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.769868	Mean dependent var		0.398333
Adjusted R-squared	0.705144	S.D. dependent var		0.026404
S.E. of regression	0.014337	Akaike info criterion		-5.447638
Sum squared resid	0.006578	Schwarz criterion		-5.033907
Log likelihood	124.4004	Hannan-Quinn criter.		-5.295989
F-statistic	11.89455	Durbin-Watson stat		2.279619
Prob(F-statistic)	0.000000			

(Sumber data dioalah)

Dari tabel regresi dengan menggunakan model fixed effect diatas, dimana ketimpangan pendapatan sebesar 0,93% dengan menggunakan asumsi bahwa variabel independen yaitu PDRB Perkapita, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai berikut:

1. Ketika PDRB Perkapita naik sebesar 1 ribu, maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.00000168 persen.
2. Ketika indeks pembangunan manusia naik sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.012682 persen.

3. Ketika tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1 persen, maka akan meningkat ketimpangan pendapatan sebesar 0.012305 persen.
4. Ketika tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka tidak akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.003987 persen.

D. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

kesimpulan

Adapun hasil yang analisis yang diperoleh maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan model fixed effect. Hasil yang diperoleh dalam uji koefisien determinasi (R^2) adalah variabel independen memperoleh angka sebesar 0.769868 atau sebesar 76.98%. adapun sisanya yaitu sebesar 23,02% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.
2. Hubungan Variabel PDRB, indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan adalah signifikan. Adapun Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan adalah tidak signifikan.

Implikasi

1. Peran pemerintah yaitu untuk lebih meningkatkan kualitas SDM dan SDA dengan adanya kebijakan yang diharapkan mampu untuk menghilangkan adanya gap antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah sehingga permasalahan ketimpangan pendapatan dapat diatasi. Selain itu perlu adanya ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga tidak terjadi lagi adanya pengangguran.

2. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka output yg dihasilkan juga akan meningkat. Sehingga perlu adanya pembekalan bagi para angkatan kerja dalam meningkatkan produktivitas dengan memberikan pembekalan dan pelatihan bagi para calon pekerja.
3. Perlu adanya peran pemerintah dalam mengambil keputusan atau kebijakan dengan lebih mempertimbangkan secara keseluruhan terhadap dampak secara menyeluruh bagi masyarakat. Sehingga tidak terjadi lagi adanya gap antar kelompok masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., & Wicaksoni, B. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Hal 323-328.
- Danawati, S., Bendesa, I., & Utama, M. S. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan kerja, Pertumbuhan Ekonomi serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi*, Hal 2123-2160.
- Darzal. (2016). Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol 4.
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 530-539.
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. B. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 2.
- Rosa, Y. D., & Sovita, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Menara Ekonomi*, Vol II.
- Rose, Y. D., & Sovita, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Jurnal Menara Ekonomi*, Vol II.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal EKSOS*, Hal 195-211.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya : Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.